

**Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah
Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi**



Oleh:

Arfian Rozaqi
NIM: 0513010252/FE/EA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2012**

SKRIPSI

**Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah
Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali**

Yang diajukan

**Arfian Rozaqi
0513010252/FE/EA**

disetujui untuk Ujian Lisan oleh

Pembimbing Utama

**Dra. Ec. Dwi Suhartini, M.Aks.
NIP : 030 226 900**

Tanggal:

**Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi**

**Drs. Ec. Rahman Amrullah Suwaidi, MS.
NIP : 196003301986031003**

SKRIPSI

**Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah
Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali**

Disusun Oleh:

Arfian Rozaqi
0513010252/FE/EA

**telah dipertahankan di hadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
pada tanggal 25 Mei 2012**

**Pembimbing:
Pembimbing Utama**

**Tim Penguji:
Ketua**

Dra. Ec. Dwi Suhartini, M.Aks.

Dra. Ec. Sri Hastuti, MSi

Sekretaris

Drs. Ec. R. Sjarief Hidayat, MSi

Anggota

Dra. Ec. Dwi Suhartini, M.Aks

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur Dekan Fakultas Ekonomi**

Dr. Dhani Ichsanudin Nur, SE, MM
NIP. 19630924 198903 1001

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Segala puja dan puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kenikmatan serta karunia-Nya yang tak terhingga sehingga saya berkesempatan menimba ilmu hingga jenjang Perguruan Tinggi. Berkat rahmat dan karunia-Nya pula saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bali”**.

Sebagaimana diketahui bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran dan bantuan maupun dorongan dari beberapa pihak maka skripsi ini tidak akan mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dr. Dany Ichsanudin Nur, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Dr. Sri Trisnaningsih, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dra.Ec. Dwi Suhartini, M.Aks., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan waktu luangnya di tengah kesibukan

beliau untuk mengoreksi kesalahan dalam pengerjaan skripsi ini secara teliti dan kritis demi kesempurnaannya.

5. Kepada dosen-dosenku yang berkecimpung di dunia perakuntansian pada umumnya, dan di bidang sektor publik/pemerintah pada khususnya yang telah memberikan ilmu-ilmunya dari pengalamannya.
6. Ayahku, yang selalu memberikan dukungan kepada saya, baik secara moril, spirituil, maupun materiil, yang nilainya tidak dapat dibayangkan, sehingga skripsi ini selesai, dan agar saya menjadi seseorang yang betul-betul bermanfaat dalam arti yang sesungguhnya.
7. Rezka, Mbak Wati, Mas Agung, Mbak Ratna, yang telah sangat banyak memberikan rujukan dan referensi serta waktu, pikiran, tenaga, dan kebesaran hatinya untuk membantu penyusunan skripsi ini.
8. Pakde, Bude, Mas Luki, Adit, Mas Roni, Mbak Yeni, Agus dan sahabat AK, yang ikut memberikan inspirasi besar agar saya terus mengerahkan segenap kemampuan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap staf pengajar, karyawan dan seluruh rekan-rekan mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Serta untuk semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang ikut membantu, baik langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kalian semua. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian saran-saran dan

petunjuk yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaannya.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Teori	17
2.2.1. Pengertian Otonomi Daerah dan Desentralisasi	17
2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi (<i>Economic Growth</i>)	18
2.2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	18
2.2.2.2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi	19

2.2.2.3.	Ciri Pertumbuhan Ekonomi	21
2.2.2.4.	Teori Pertumbuhan Ekonomi	22
2.2.2.5.	Ukuran Pertumbuhan Ekonomi	24
2.2.2.6.	Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	26
2.2.2.7.	Pendekatan Perhitungan PDRB	27
2.2.2.8.	Kegunaan Statistik PDRB	29
2.2.3.	Pengertian Anggaran (<i>Budgeting</i>)	29
2.2.4.	Anggaran Pendapatan (<i>Revenue Budgeting</i>)	31
2.2.4.1.	Pengertian Anggaran Penapatan dan Pendapatan Asli Daerah	31
2.2.4.2.	Struktur Pendapatan Asli Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah	33
2.2.5.	Anggaran Belanja (<i>Expenditure Budgeting</i>)	38
2.2.5.1.	Pengertian Anggaran Belanja Daerah	38
2.2.5.2.	Komponen Anggaran Belanja Daerah	39
2.2.6.	Pengertian Anggaran Belanja Modal	40
2.2.7.	Pengertian Anggaran Belanja Rutin	41
2.2.8.	Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonom	42
2.2.9.	Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	44
2.2.10.	Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi	47

2.3. Kerangka Pikir	48
2.4. Hipotesis (Hypothesis)	49

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	51
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)	51
3.1.2. Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (X1)	52
3.1.3. Realisasi Anggaran Belanja Modal (X2)	52
3.1.4. Realisasi Anggaran Belanja Rutin (X3)	52
3.2. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel	53
3.2.1. Populasi	53
3.2.2. Sampel	53
3.3. Teknik Pengumpulan Data	54
3.3.1. Jenis Data	54
3.3.2. Sumber Data	54
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	55
3.4.1. Teknik Analisis	55
3.4.2. Uji Asumsi Klasik	55
3.4.3. Uji Hipotesis	60
3.4.3.1. Uji-t	60
3.4.3.2. Uji-F	61

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	63
---------------------------------------	----

4.1.1.	Sejarah Singkat Propinsi Bali	63
4.1.2.	Letak Geografis, Batas Administrasi, dan Luas Wilayah Propinsi Bali	65
4.2.	Deskripsi Hasil Penelitian	67
4.2.1.	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	67
4.2.2.	Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (X_1)	68
4.2.3.	Realisasi Anggaran Belanja Modal (X_2)	70
4.2.4.	Realisasi Anggaran Belanja Rutin (X_3)	71
4.3.	Analisis Regresi Linier Berganda	73
4.3.1.	Asumsi Klasik	73
4.3.2.	Persamaan Regresi Linier Berganda	79
4.3.3.	Uji F	80
4.3.4.	Koefisien Determinasi	81
4.3.5.	Uji t	82
4.4.	Pembahasan Hasil Penelitian	84
4.4.1.	Implikasi Penelitian	84
4.4.2.	Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi	84
4.4.3.	Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	89
4.4.4.	Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	93
4.4.5.	Perbedaan Hasil Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu	96

4.4.6. Keterbatasan Penelitian	98
--------------------------------------	----

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	98
5.2. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Bali 2001-2005	6
Tabel 3.1	Kriteria Uji Durbin Watson	56
Tabel 4.1	Luas Wilayah Tiap Kabupaten di Propinsi Bali	66
Tabel 4.2	Data Pertumbuhan Ekonomi	67
Tabel 4.3	Data Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah	68
Tabel 4.4	Data Realisasi Anggaran Belanja Modal	70
Tabel 4.5	Data Realisasi Anggaran Belanja Rutin	71
Tabel 4.6	Hasul Dari Uji <i>Rank Spearman</i>	75
Tabel 4.7	Nilai VIF	76
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas	78
Tabel 4.9	Persamaan Regresi Linier Berganda	78
Tabel 4.10	Hasil Uji F	80
Tabel 4.11	Nilai Koefisien Determinasi	81
Tabel 4.12	Hasil Uji t	82
Tabel 4.13	Perbedaan-Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1	Kerangka Pikir	49
Gambar 4.1	Kurva Pertumbuhan Ekonomi	67
Gambar 4.2	Kurva Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah	69
Gambar 4.3	Kurva Realisasi Anggaran Belanja Modal	70
Gambar 4.4	Kurva Realisasi Anggaran Belanja Rutin	72
Gambar 4.5	Kurva PAD dan Pertumbuhan Ekonomi (Jembrana)	86
Gambar 4.6	Kurva Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi (Tabanan)	90
Gambar 4.7	Kurva Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi (Gianyar)	94

Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bali

**Oleh:
Arfian Rozaqi**

ABSTRAKSI

Semenjak dorongan reformasi birokrasi yang digulirkan pada tahun 1999, telah mendekonstruksi sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Semangat reformasi birokrasi mencapai puncaknya pada tanggal 1 Januari 2001, yaitu sebagai tonggak awal pelaksanaan Otonomi Daerah yang merupakan konsekuensi logis dari asas desentralisasi. Kondisi tersebut merupakan babak baru bagi Negara Indonesia dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara yang berorientasikan pada pencapaian kinerja dengan memfokuskan pada *output* dan *outcome*. Tujuan otonomi daerah adalah diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, dan percepatan pertumbuhan ekonomi serta kemandirian yang merupakan implementasi dari *output* dan *outcome* (Mardiasmo, 2002: 59, Bastian, 2006: 354). Segala kegiatan pemerintah dalam ruang lingkup Otonomi Daerah dibiayai oleh APBD. Penelitian ini dilakukan bermaksud untuk melihat sejauh mana efek pelaksanaan otonomi daerah yang dibiayai APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Objek penelitian ini adalah data-data keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Bali dari tahun 2001-2008, yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data-data keuangan yang diteliti meliputi Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Realisasi Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian secara simultan untuk Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Anggaran Belanja Modal, Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Rutin berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan secara parsial menunjukkan hanya Realisasi Anggaran Belanja Rutin yang berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Anggaran Belanja Rutin tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Keyword: Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Anggaran Belanja Modal, Realisasi Anggaran Belanja Rutin, Pertumbuhan Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tiga dekade yang lalu perekonomian masyarakat Bali sangat didominasi oleh pertanian, baik dalam produksi maupun lapangan kerja. Saat ini pariwisata adalah satu-satunya industri yang paling besar di sana yang pada akhirnya menyebabkan Bali sebagai salah satu daerah paling kaya di Indonesia. Sekitar 80% perekonomian Bali bergantung pada pariwisata (Baker, 2003: 1). Di akhir Juni 2011, kredit bermasalah atas semua Bank di Bali rata-rata sebesar 2,23%, relatif lebih kecil dibandingkan dengan sekitar rata-rata 5% dari kredit bermasalah industri perbankan Indonesia (<http://www.thejakartapost.com>).

Perekonomian Bali mengalami keterpurukan yang cukup berarti saat terjadi bom teroris pada tahun 2002 dan 2005, namun industri pariwisata perlahan pulih lagi, hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam *website* <http://www.thebalitimes.com> bahwa pariwisata Bali bertahan terhadap bom teroris tahun 2002 dan 2005, dan faktanya telah perlahan pulih bahkan mengungguli level sebelum pengeboman. Tren jangka panjang tetap menunjukkan peningkatan jumlah kedatangan pengunjung, pada tahun 2010, Bali menerima 2,57 juta turis asing. Ini mengungguli target 2-2,3 juta turis.

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan

hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Peraturan Perubahan Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Mardiasmo, 2002: 24). Kedua undang-undang tersebut merupakan payung hukum pelaksanaan dan tonggak awal diselenggarakannya otonomi daerah (Bastian, 2006: 2), yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001 (Saragih, 2003: 29; Kuncoro, 2004: 18).

Menurut Mardiasmo (2002: 59), tujuan utama pelaksanaan dan pemberlakuan undang-undang otonomi daerah diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Menurut Bastian (2006: 354), tujuan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Yuliati (2001: 16) menyatakan bahwa dalam usaha mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian. Pendapat tersebut didukung Malthus (Irawan dan Suparmoko, 2002: 27), bahwa untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus.

Modal sebagai faktor produksi pada pembangunan ekonomi bukan dalam bentuk uang (*money*) tetapi *real capital* atau *capital goods* (barang-barang modal). Penanaman/penambahan modal terhadap persediaan barang modal biasanya disebut investasi (Kamaluddin, 1996: 71-72). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2005), investasi dalam kerangka pemerintah didefinisikan sebagai belanja modal/pembangunan yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Pengertian tersebut ditekankan pada penggunaan aset untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat/publik. Suatu aset di pemerintah (pusat atau daerah), khususnya aset tetap seperti dalam bentuk tanah, bangunan, infrastruktur sarana dan prasarana publik, dan aset tetap lainnya diperoleh melalui proses pengeluaran dana yang disebut Belanja Modal (Halim dan Subiyanto, 2008: 4-5).

Penginvestasian pemerintah yang berasal dari belanja modal dari tahun ke tahun akan berakumulasi menjadi akumulasi modal yang merupakan keharusan bagi pembangunan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang sedang berkembang untuk menjadi negara yang lebih maju, hal ini sejalan dengan pendapat Suryana (2000: 72) bahwa semakin besar modal yang tersedia maka akan mempercepat pembangunan ekonomi.

Menurut model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan Walt Whitman Rostow dengan menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah seiring tahap-tahap pembangunan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan Teori Dorongan Kuat (*big push theory*), pada tahap awal perkembangan ekonomi pemerintah akan membutuhkan investasi yang besar (Mangkoesobroto, 1993: 170). Musgrave

berpendapat bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah untuk barang modal sebagai pemberian fasilitas sarana dan prasarana publik untuk pengembangan investasi harus lebih besar daripada sektor swasta sehingga kemudian diharapkan peranan pemerintah dalam pembentukan modal akan menurun setelah berlangsungnya proses pertumbuhan ekonomi (Mangkoesoebroto, 1993: 170).

Teori pengeluaran yang dikemukakan oleh Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran dan kegiatan pemerintah yang semakin meningkat telah lama dirasakan. Tendensi makin meningkatnya pengeluaran pemerintah oleh Wagner dinamakan “Gesetz der wachsenden Ausdenhmung den Staatstatigkeiten” atau hukum selalu makin meningkatnya kegiatan-kegiatan negara (*law of ever increasing state activities*). Hukum Wagner tersebut oleh R.A. Musgrave disebut hukum “growing public expenditure” atau hukum makin meningkatnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Soetrisno, 1984: 364). Peningkatan kegiatan pemerintah difokuskan untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tujuan otonomi daerah diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Teori hukum Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu pelaksanaan tujuan otonomi daerah yang diimplementasikan pada pengeluaran belanja rutin (Soetrisno, 1984: 364).

Pengeluaran belanja rutin diidentikkan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan yang ada setiap tahun (Mardiasmo, 2002: 66). Pendapat tersebut didukung teori Walt Whitman Rostow tentang pengeluaran pemerintah yang didasarkan pada tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dan hukum Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran semakin meningkat berdasarkan kegiatannya dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah (Mangkoesobroto, 1993: 170; Soetrisno, 1984: 364).

Tujuan utama penerapan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2002: 59; Bastian, 2002: 354). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dengan kata lain adanya peningkatan PAD merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan diyakini antara PAD dan pertumbuhan ekonomi terdapat adanya korelasi (Saragih, 2003: 55-58). Pendapat tersebut didukung Teori Peacock dan Wiseman yang mengemukakan suatu teori “bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar pula” (Mangkoesobroto, 1993: 173).

Penelitian ini mencoba untuk menguji secara empiris terkait dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Bali, hal ini seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

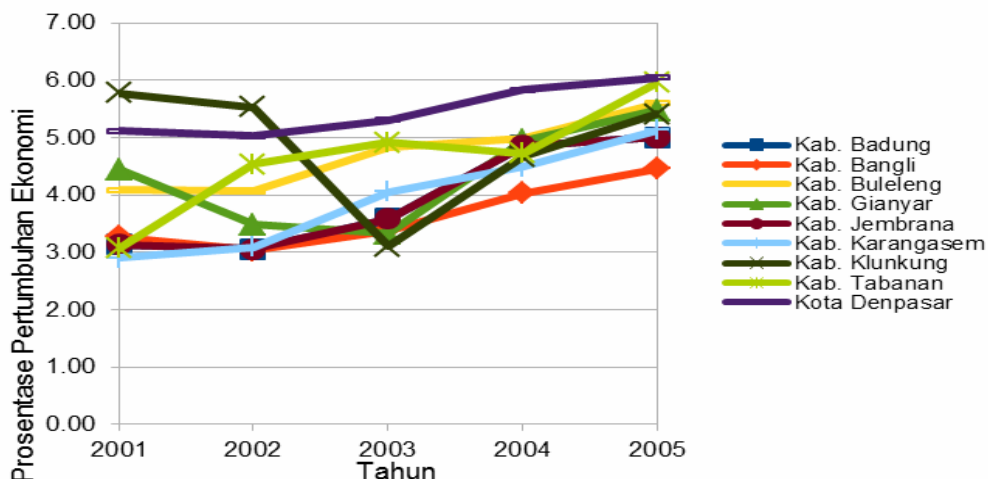
Tabel 1.1: Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Bali 2001-2005

	Pertumbuhan Ekonomi	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Badung	3.14	3.06	3.58	4.86	5.00
2	Kab. Bangli	3.27	3.03	3.38	4.03	4.46
3	Kab. Buleleng	4.09	4.06	4.84	4.98	5.60
4	Kab. Gianyar	4.45	3.48	3.33	4.95	5.47
5	Kab. Jembrana	3.14	3.06	3.58	4.86	5.00
6	Kab. Karangasem	2.90	3.09	4.05	4.49	5.13
7	Kab. Klungkung	5.78	5.53	3.10	4.67	5.41
8	Kab. Tabanan	3.07	4.54	4.91	4.73	5.96
9	Kota Denpasar	5.12	5.03	5.31	5.83	6.05

Sumber: Badan Pusat Statistik

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1: Prosentase Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Bali 2001-2005



Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Bali selama lima tahun (2001-2005) diraih oleh dua kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar. Untuk tahun 2001 dan 2002 pertumbuhan ekonomi tertinggi diraih

oleh Kabupaten Klungkung dengan prosentase masing-masing sebesar 5,78% dan 5,53%, sedangkan untuk tahun 2003 sampai 2005 Kota Denpasar meraih pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dengan angka pertumbuhannya masing-masing sebesar 5,31%, 5,83% dan 6,05%.

Pertumbuhan ekonomi terendah di Bali tahun 2001-2005 dialami oleh tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Karangasem untuk tahun 2001 sebesar 2,90%, Kabupaten Bangli untuk tahun 2002 sebesar 3,03%, tahun 2004 sebesar 4,03%, dan tahun 2005 sebesar 4,46%, serta Kabupaten Klungkung untuk tahun 2003 sebesar 3,10%.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah dari tahun 2001 sampai dengan 2005 di Propinsi Bali tersebut maka dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi oleh kabupaten/kota di Bali. Dan dapat dilihat pula bahwa terdapat perubahan yang cukup drastis yang dialami Kabupaten Klungkung yang pada tahun 2001 meraih pertumbuhan ekonomi tertinggi namun pada tahun berikutnya justru menjadi yang terendah.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Otonomi Daerah Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bali”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan yang dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah untuk mengetahui apakah realisasi anggaran pendapatan asli daerah, realisasi anggaran belanja modal, dan realisasi anggaran belanja rutin berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi di era Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bali.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empirik pengaruh realisasi anggaran pendapatan asli daerah, realisasi anggaran belanja modal, dan realisasi anggaran belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Era Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2001-2008.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan berbagai manfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut:

a. Peneliti

Untuk memperdalam keilmuan di bidang sektor publik, baik akuntansi/keuangan pemerintah maupun organisasi nirlaba.

b. Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga sebagai Dharma Bhakti perguruan tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada umumnya dan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada khususnya untuk konsentrasi Sektor Publik sebagai tambahan perbendaharaan referensi dan mungkin dapat memberikan ide atau inspirasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut bagi rekan-rekan yang mungkin mengadakan penelitian di bidang yang sama berkaitan dengan tujuan penelitian di masa yang akan datang.

c. Peneliti selanjutnya.

Memberikan kontribusi atau referensi tambahan sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk penelitian di bidang akuntansi sektor publik/keuangan daerah serta pengukuran kinerja pemerintah.

d. Pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bukti empiris keterkaitan tentang realisasi anggaran pendapatan asli daerah, realisasi anggaran belanja modal dan realisasi anggaran belanja rutin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.